

---

## Poskolonialisme dan Ekologi Pascakolonial: Sebuah Tinjauan Pustaka

Nasrullah<sup>1\*</sup>, Awang Azman Awang Pawi<sup>1</sup>, Umami Hani Abu Hassan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>University of Malaya, Malaysia

<sup>2</sup>Hankuk University, South Korea

\*Correspondence: s2117359@siswa.um.edu.my

---

### Abstract

Postcolonialism and postcolonial ecology are two concepts that emerge from their interconnectedness. Postcolonialism itself arises from the intersection of poststructuralist and neo-Marxist thought, while postcolonial ecology originates from the intersection of ecological studies (or ecocriticism) and postcolonial studies. The relationship between these fields further enriches the analysis of the complex socio-cultural dynamics present in today's society. This paper aims to contribute to the existing literature on postcolonial and ecological studies by introducing an ecological approach that also addresses the influence of colonial ideologies and practices from the past, which continue to have an impact today. The hope is that this literature review will heighten postcolonial awareness, particularly within the realm of ecological studies, and serve as a valuable analytical tool for understanding the impacts of climate change that have been increasingly discussed and studied in recent times.

**Keywords:** postcolonialism, postcolonial ecology, climate change, literature review, ecocriticism.

---

### Abstrak

Poskolonialisme dan ekologi pascakolonial adalah dua pemikiran yang lahir dari keterkaitan satu sama lain. Poskolonialisme sendiri lahir dari interseksi pemikiran pascastruktural dan neo-marxisme. Sementara itu, ekologi pascakolonial lahir dari interseksi antara kajian ekologi atau ekokritik dan kajian pascakolonial. Keterkaitan antara kajian ini semakin memperkaya analisis masalah yang diakibatkan oleh kompleksitas dinamika sosial budaya yang ada di masyarakat dewasa ini. Tulisan ini bertujuan untuk memperkaya khasanah literatur kajian poskolonial dan kajian ekologi yang telah ada dengan memperkenalkan suatu pendekatan ekologi yang sekaligus terkait dengan adanya pengaruh pemikiran dan praktik kolonial di masa lampau yang masih berpengaruh dan berlangsung sampai hari. Kesadaran pascakolonial termasuk dalam ranah kajian ekologi diharapkan dapat ditingkatkan dengan adanya kajian literatur ini, terutama untuk digunakan sebagai alat analisis dalam membaca dampak perubahan iklim yang ramai dibicarakan dan dikaji belakangan ini.

**Kata Kunci:** poskolonialisme, ekologi pascakolonial, perubahan iklim, kajian pustaka, ecocriticism.

---

### 1. Pendahuluan

Poskolonialisme dan ekologi pascakolonial adalah dua pemikiran yang lahir dari keterkaitan satu sama lain. Poskolonialisme sendiri lahir dari interseksi pemikiran pascastruktural dan neo-marxisme (Barker & Jane, 2016). Sementara itu, ekologi pascakolonial lahir dari interseksi antara kajian ekologi atau ekokritik dan kajian pascakolonial (Huggan and Tiffin, 2015; DeLoughrey & Handley, 2011). Keterkaitan antara kajian ini semakin memperkaya analisis masalah yang diakibatkan oleh kompleksitas dinamika sosial budaya yang ada di masyarakat dewasa ini. Tulisan ini bertujuan untuk memperkaya khasanah literatur kajian poskolonial dan kajian ekologi yang telah ada dengan memperkenalkan suatu pendekatan ekologi yang sekaligus terkait dengan adanya pengaruh pemikiran dan praktik kolonial di masa lampau yang masih berpengaruh dan berlangsung sampai hari ini (Mukherje, 2010; Gilbert, 2000; Barker and Jane, 2016; Nixon, 2011; Nasrullah, 2022). Kesadaran pascakolonial termasuk dalam ranah kajian ekologi diharapkan dapat ditingkatkan

dengan adanya kajian literatur ini, terutama untuk digunakan sebagai alat analisis dalam membaca dampak perubahan iklim yang ramai dibicarakan dan dikaji belakangan ini.

## 2. Poskolonialisme dalam Kajian Budaya

Kajian budaya (*cultural studies*) dan kajian pascakolonial (*postcolonial studies*) memiliki hubungan yang sangat dekat. Pada dasarnya, kajian budaya memiliki tujuan untuk mewacanakan kelompok terpinggirkan. Secara teratur wacana dan praktek *cultural studies* bertemu dengan kajian pascakolonial yang secara khusus mengkaji kepentingan politik dan ideologi negara dan masyarakat bekas jajahan (*ex-colonized*) dari dominasi dan hegemoni mantan penjajah (*ex-colonizer*) (Barker & Jane, 2016, 14-28; Nasrullah, 2022). Pascakolonialisme mengkritik produk pengetahuan dan budaya kolonial sejak kolonialisme mempengaruhi manusia dan tanah koloni sampai sekarang.

Gilbert (2000) di *Postcolonial Theory: Context, Practice, Politic* dan Gilbert, Stanton, dan Maley (2013) dalam *Postcolonial Critique* menjelaskan dinamika awal dari kajian pascakolonial. Tiga tokoh utama kajian pascakolonial ini adalah Edward Said, Homi K. Bhabha, dan Gayatri C. Spivak. Ketiganya diketahui sebagai "Trinitas Kajian Pascakolonial" (*The Trinity of postcolonial studies*). Ketiganya memiliki peran sebagai peletak dasar dari kajian pascakolonial. Edward Said dikenal melalui karyanya *Orientalism* (1978). Sementara itu, Homi K. Bhabha diketahui melalui karyanya *The Location of Culture* (1994). Adapun Gayatri C. Spivak diketahui melalui karyanya tentang perempuan India dalam *Can the Subaltern Speak?* (1994).

Ketiganya tokoh bersama dengan karyanya ini mewakili tiga fokus kajian utama di dalam kajian pascakolonial. Edward Said fokus kepada representasi Timur yang dijajah oleh kolonial Barat. Sementara Bhabha menyatakan pertemuan Budaya Barat dan Timur yang menghasilkan budaya hibrid (Gilbert, 2000; Gilbert dkk, 2013). Di sisi lainnya, Spivak fokus dengan feminisme poskolonial dengan mengkaji perempuan di negara bekas koloni seperti India. Fokus-fokus kajian ini menunjukkan perjalanan kajian pascakolonial di dalam dinamika kajian budaya yang terbentuk sebagai konsekuensi dari pengaruh kolonialisme dan dampaknya sampai hari ini.

Hubungan di antara kajian budaya (*cultural studies*) dan kajian pascakolonial (*postcolonial studies*) semakin meningkat sehubungan dengan kehadiran masalah dominasi-subordinasi dan hibridisasi-kreolisasi. Kedua masalah ini sejalan dengan karakteristik kajian budaya yang melihat budaya sebagai praktik politik dan ideologi. Di dalam kajian pascakolonial, hubungan politik dan ideologi di antara subjek penjajah dan subjek terjajah menjadi fokus kajian. Pembelahan (biner) antara dominan-subordinat di antara penjajah dan terjajah terkait dengan kajian Orientalisme Edward Said (Barker & Jane, 2016, p.28; Gilbert, Stanton, & Maley, 2013). Sementara itu, hibridisasi dan kreolisasi rapat koneksi dengan perdebatan dari Homi K Bhabha. Di sisi lain, tentang respon perempuan di negara bekas jajahan dalam melawan dominasi yang dialaminya menjadi domain perdebatan oleh Gayatri C. Spivak. Adapun perempuan yang tertindas dikategorikan sebagai subaltern menurut Spivak. Itulah topik - topik kajian yang menghubungkan dinamika hubungan diantara kajian budaya dan kajian pascakolonial.

## 3. Poskolonialisme dan Ekologi Pascakolonial

Pascakolonialisme atau sering juga ditulis dengan poskolonialisme adalah kajian yang mengkaji pengaruh kolonisasi dalam budaya dan masyarakat bekas terjajah. Seperti aslinya digunakan oleh para sejarawan setelah Perang Dunia Kedua di dalam ketentuan seperti negara pasca-kolonial, "pasca-kolonial" memiliki arti kronologi yang jelas, yaitu sebagai tanda periode setelah kemerdekaan (Nayar, 2015, 124; Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin, 2013, 204; Nasrullah, 2022). Meskipun demikian, sejak periode akhir tahun 1970an telah digunakan oleh para kritikus sastra untuk membahas bermacam-macam pengaruh budaya kolonialisme, dari era kolonialisme dimulai sampai sekarang selama efeknya tetap terjadi secara berkelanjutan dalam produksi pengetahuan dan kebudayaan. Tentang perbedaan ketentuan diantara poskolonial dan poskolonialisme, Leela Gandhi

Gandhi menjelaskan bahwa “teorinya disebut poskolonialisme”, dan syarat-syaratnya dibahas diketahui sebagai “pascakolonial” (Gandhi, 2019, p.4). Situasinya pasca-kolonial, yaitu sejak kolonialisme telah mempengaruhi daerah jajahan sejak awal penjajahan dan berlanjut sampai sekarang.

Ekologi pascakolonial sebenarnya adalah kombinasi di antara ekokritisisme (*ecocriticism*) dan kajian poskolonial (*postcolonial studies*) dalam menganalisa situasi ekologi di negeri koloni dan bekas koloni (Banerjee, 2016, hal.194). Studi terkait alam sekitar di dalam karya sastra terkait situasi manusia terjajah adalah topik kajian antara ekologi dan studi poskolonial. Manusia terjajah dan bekas jajahan, bersama kondisi ekologis di wilayah tersebut merupakan objek kajian dari ekologi pascakolonial. Banerjee (2016) dengan artikelnya "*Ecocriticism and Postcolonial Studies*" di *Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology* menjelaskan ekokritisisme sebagai kajian kritis di dalam melihat alam sekitar yang disajikan di dalam karya sastra. Sedangkan kajian pascakolonial menganalisa bagaimana keadaan kolonial direpresentasikan di dalam literatur kolonial (Banerjee, 2016, 194-197; Nasrullah, 2022). Oleh karena itu, ekokritisisme poskolonial atau biasa juga dikenal sebagai kajian ekologi poskolonial adalah studi analitis tentang alam dan manusia terjajah sejak kolonialisme dimulai dan setelahnya.

Graham Huggan dan Helen Tiffin (2015, 2) di *Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animal, Environment* menekankan bahwa ekokritisisme pascakolonial adalah pendekatan baru di dalam menganalisa kolonialisme dan lingkungan kolonial. Perspektif ini tetap berlanjut sampai sekarang melalui eksploitasi alam secara berlebihan untuk kepentingan negara-negara maju. Namun, peminjaman perspektif kolonial di dalam melihat bagaimana lingkungan sekitar dari tanah koloni dan eks-koloni diperlakukan, perspektif penjajah ini dapat diwarisi oleh manusia bekas jajahan. Bahkan, bisa menjadi lebih eksploitatif dari bekas penjajahnya. Huggan and Tiffin (2015, 3-4) menggunakan pendekatan imperialisme ekologi, dekolonisasi, dan rasisme alam sekitar sebagai tanda mendekati kolonialisme yang tidak hanya menjajah tubuh dan pikiran manusia, namun juga menjajah alam dan lingkungan sebuah negeri.

Eksplorasi alam dan lingkungan hidup tanah koloni melalui eksploitasi sumber daya alam dan kekayaan biologi di tanah koloni juga dihadirkan di dalam teks sastra dan sejarah. Hubungan di antara penjajah dan tanah koloni menjadi fokus analisis ekokritisisme pascakolonial ini. Bagaimana alam dan lingkungan tanah koloni direpresentasikan di dalam karya sastra dan teks ilmu pengetahuan dan budaya kolonial adalah pertanyaan utama ekologi/ekokritisisme pascakolonial ini. Sebagai tambahan, bagaimana manusia terjajah direpresentasikan bersama alam dan lingkungan di mana mereka berada kehidupan sebagai sebuah koloni. Perjumpaan diantara poskolonialisme dan ekokritisisme adalah basis dari kajian ekologi pascakolonial atau umum disebut dengan ekokritisisme pascakolonial (*postcolonial ecocriticism*) dalam kajian budaya (Huggan and Tiffin, 2015). Hubungan di antara kajian ekologi dan kajian pascakolonial menekankan bahwa kolonialisme Eropa juga menyumbang kerusakan ekologi di negara-negara koloni dan bekas koloni. Faktanya, setelahnya kolonisasi fisik berakhir, sampai sekarang kerusakan alam, eksploitasi pekerja dan marginalisasi masyarakat lokal tetap terjadi. Bahkan, bisa jadi terjadi lebih masif dari segi skala dan juga intensitas. Artinya, ada kontinuitas pemikiran dan praktik dari kolonialis atau bekas penjajah yang dilakukan oleh manusia bekas koloni atau bekas terjajah.

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang ekologi pascakolonial yaitu praktik ekologi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sejak kedatangan Kolonialisme Barat - Eropa di negara-negara koloni sampai sekarang (Huggan & Tiffin, 2015; Willow, 2019; Grosfoguel, 2020). Lima faktor determinan yang dikatakan adalah pembangunan (*development*), hak kepemilikan (*entitlement*), Kristenisasi (*Christianity*), ekstraktivisme (*extractivism*), dan migrasi (*migration*).

### **3.1. Pembangunan (Development)**

Salah satunya variabel utama dari konsep ekologi pascakolonial adalah pembangunan (*developmentalism*). Ideologi pembangunan (*developmentalisme*) adalah kritik utama dari ekologi pascakolonial. Hal ini karena pembangunan yang dikatakan adalah hasil dari modernisasi memerlukan banyak bahan baku dan bahan mentah dari negara-negara eks-koloni atau negara pascakolonial (Huggan dan Tiffin, 2015, 29-30; Grosfoguel, 2020, 215).

Bagaimanapun, *developmentalisme* sejalan dengan ekstraktivisme dan eksploitasi kekayaan alam demi kepentingan perkembangan negara-negara maju. Melalui pembenaran ideologi pembangunan itu, modernisasi dapat menyesuaikan agendanya dan eksploitasi kekayaan wilayah kolonial dan bekas koloni mendapatkan pembenaran ilmiah dan ideologis.

Sementara itu, *developmentalisme* menghasilkan dampak kerusakan alam sekitar, eksploitasi pekerja, dan marginalisasi masyarakat lokal (Huggan dan Tiffin, 2015, 29-97). Budaya masyarakat lokal (*local culture*) yang dianggap tidak paralel atau tidak sesuai dengan kepentingan dan agenda pembangunan modern (*developmentalisme*) dinilai tidak maju bahkan tidak beradab (terbelakang dan tidak beradab). Dengan demikian, eksploitasi kekayaan alam sekitar dan ruang kehidupan masyarakat lokal dianggap sah atas nama pembangunan.

### 3.2. Kepemilikan (*Entitlement*)

Huggan dan Tiffin (2015, 98-100) menjelaskan kepemilikan dengan menjelaskan hubungannya dengan "pastoralisme". Arti hak kepemilikan di sini adalah hak dominasi atas tanah atau wilayah. Hukum yang diakui oleh pelaku kolonisasi adalah peraturan perundang-undangan positif gaya Barat yang mengakui kepemilikan tanah secara individu. Hal ini tentu saja berbeda dengan hak kepemilikan kolektif dalam komunitas adat yang ditemukan pada awal perkembangan kolonialisme Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika.

Adapun "pastoralisme" adalah praktik domestikasi dan penggembalaan binatang hewan peliharaan di lokasi yang telah dianggap sebagai milik pribadi. Pembatas (*enclosure*) adalah penanda yang dikatakan dan diakui oleh hukum milik mereka sendiri yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat lokal yang tidak mengakui hak milik pribadi, apalagi batas wilayah lokasi pertanian dan peternakan ala kolonialisme Eropa awal.

Klaim ke atas hak individu pada tanah dan lokasi ini ditandai dengan perbatasan dan sertifikat penguasaan tanah. Pada umumnya ditandai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam lingkaran masyarakat kolonialisme Eropa. Dengan kepemilikan tanah dan klaim kepemilikan individu, dengan menggunakan hukum sendiri, kolonialisme Eropa memulai kegiatan ekstraktif mereka atas tanah koloni baru (Huggan & Tiffin, 2015, hal.98-140). Konsep "alam" atau ranah yang terpisah dengan "kosmos", dan makna terpisah dari manusia membuat dominasi awal atas tanah koloni sebagai penaklukan melawan alam oleh manusia Eropa di Amerika, Asia, dan Afrika. Mulailah proses pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia yang berlebihan dan untuk memenuhi kepentingan "metropolis" di Eropa.

Cara berpikir Cartesian dan Eropa modern juga tumbuh di dalam tanah koloni. Termasuk bagaimana pertanian secara teratur dipraktikkan dengan mendominasi dan mengklaim tanah sebagai milik pribadi dan tidak mengakui hukum penguasaan dan pemanfaatan tanah dan wilayah oleh masyarakat awal yang menduduki wilayah tersebut (Huggan dan Tiffin, 2015, 98-148). Kontestasi penguasaan atas tanah dan dominasi perundang-undangan mana yang berlaku tidak bisa dihindari, dan telah diketahui pemenangnya adalah orang Eropa penjajah yang menggunakan senjata api dan penyakit menular yang dibawanya lalu ditularkan ke masyarakat lokal.

### 3.3. Kekristenan (*Christianity*)

Huggan dan Tiffin (2015, 180-181) menjelaskan Kekristenan atau Kristenisasi adalah peralatan penaklukan yang pertama secara ideologi (tanpa kekerasan). Praktik ini digunakan untuk penaklukan tanah koloni dengan agenda misi peradaban melawan masyarakat penduduk lebih awal yang dianggap penduduk koloni tidak beradab (*uncivilised*). Orang Eropa lebih awal mempertimbangkan misi yang dikatakan sebagai beban orang kulit putih (*white's man burden*) yang memiliki tugas suci untuk membudayakan manusia di tanah koloni sesuai ajaran dan kepentingan mereka.

Di samping itu, menganggap penduduk tanah koloni sebagai lebih rendah dari manusia Eropa, misi Kristenisasi juga berubah sudut manusia koloni melawan lingkungan (Huggan & Tiffin, 2015). Pada mulanya, masyarakat lokal di daerah koloni menganggap alam sekitar dengan alam semesta dan manusia termasuk di dalamnya adalah satu kesatuan. Namun, agama Kristen mengubah sudut pandang tersebut dengan memisahkan manusia dengan alam, dan juga berorientasi ke langit dalam memuja Tuhan yang diyakini dengan iman Kristen. Sehingga, pemisahan antara manusia dan alam sekitar menurut Huggan dan Tiffin (2015) diawali dengan berlakunya doktrin kristen pada penduduk yang diperadabkan melalui agama Kristen.

Dengan demikian, konsep keilahan penduduk lokal yang bersatu dengan alam di bumi dijauhkan dari habitat dan orientasi ke langit. Oleh karena itu, alam sekitar tidak lagi sakral seperti yang dipertahankan selama ratusan tahun oleh penduduk lokal yang ditaklukkan oleh kolonialisme Barat - Eropa di "Timur" (Huggan dan Tiffin, 2015, 180-200). Dengan desakralisasi alam sekitar tersebut, maka dominasi dan eksploitasi alam sekitar tanah koloni berlangsung secara lancar tanpa rintangan seperti yang terjadi sebelumnya.

### **3.4. Ekstraktivisme (Extractivism)**

Tentang hubungan perdagangan dan kolonialisme, Huggan dan Tiffin (2015) menyediakan ilustrasi tentang perdagangan Gading Gajah di Afrika. Ilustrasi ini diambil dari karya Joseph Conrad (1901) yang terkenal di seluruh dunia hingga sekarang ini, yaitu *Heart of Darkness*. Karya ini ditulis oleh Joseph Conrad pada tahun 1901 dan memberi tahu tentang negara Kongo di Afrika yang saat itu dijajah dan dieksploitasi kekayaannya berupa gading gajah Afrika. Berdagang kekayaan alam ini membentuk kolonisasi lingkungan Afrika oleh para pedagang Belgia di dalam kisah Conrad (Huggan & Tiffin, 2015, 159-177).

Sebelum perkebunan dan pertambangan massif dilakukan di tanah koloni, kegiatan lebih awal kolonialisme adalah dengan melakukan dan memonopoli perdagangan di tanah koloni (Huggan & Tiffin, 2015, 160-165). Di Asia dan Afrika adalah daerah dari tanah koloni ini, termasuk di negara-negara Asia Tenggara, Dunia Melayu, Nusantara. Di Kepulauan Melayu Nusantara, perdagangan hasil alam secara umum dan hasil hutan pada khususnya adalah komoditas yang diperdagangkan seperti rotan, sarang burung, karet, gutta perca, kayu gaharu, dan masih banyak lagi komoditas lainnya. Lebih banyak lagi dan menjadi catatan sejarah yaitu perdagangan rempah-rempah seperti komoditas cengkeh, pala, dan merica.

Setelah itu, kegiatan ekonomi kolonial adalah perkebunan teh, kopi, tebu untuk menghasilkan gula, pertanian karet, tembakau, kelapa, kelapa sawit, dan komoditas ekspor perkebunan yang lain. Dalam proses budidaya skala besar untuk menghasilkan komoditas ekspor di pasar internasional ini, kolonialisme bergeser dari berdagang menjadi perkebunan untuk menghasilkan bahan baku untuk industri - industri Eropa (Alatas, 1977; Said, 1993; Gandhi, 1999). Di dalam perkembangan kapitalisme inilah yang disebut sebagai ekstraktivisme mulai dilakukan di tanah koloni seperti di Dunia Melayu, Kepulauan Nusantara dan tanah koloni kulit putih Eropa lainnya di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan (Amerika Latin).

Adapun ekstraktivisme adalah istilah yang mengacu pada praktik industri ekstraktif di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang atau yang biasa disebut sebagai negara pinggir. Grosfoguel (2020, 203) menulis definisi ekstraktivisme dari *international division of labour* dengan,

“ekstraktivisme adalah mekanisme yang menghubungkan eksploitasi sumber daya dan bahan mentah di wilayah pinggir—dengan segala konsekuensinya yang merusak bagi kehidupan pekerja tambang, komunitas mereka, dan lingkungan—dengan proyek ilmiah seperti *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire* (CERN) di Swiss, chip komputer, dan iPhone. Ekstraktivisme mempunyai konsekuensi tidak hanya dalam hal pemiskinan pekerja tambang, namun juga proses yang menghancurkan kehidupan dan ekologi planet ini.”

Bahan bahan baku dan bahan mentah adalah obyek ekstraktif dari praktik ekstraktivisme oleh industri ekstraktif ini. Menurut Grosfoguel, ada tiga pihak yang mengalaminya kerugian atau eksploitasi oleh industri ekstraktif ini yaitu kehidupan buruh, masyarakat lokal dan lingkungan hidup.

#### 3.4.1. Ekstraktivisme Sumber Daya Alam

Anna J. Willow (2019) dalam *Understanding Extractivism* menjelaskan bahwa ekstraktivisme adalah praktik mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan di luar kebutuhan di lokasi tersebut tempat kekayaan alam itu diproduksi. Ekstraktivisme juga mengarahkan ke penyerahan kekayaan alam itu ke luar dari tempatnya diambil, secara umum ke negara-negara pemilik kebutuhan energi dan bahan mentah untuk kebutuhan industri mereka (Willow, 2019, hal.17). Ekstraktivisme menurut Anna J. Willow di sini adalah praktik yang dilakukan oleh negara-negara Barat, khususnya Eropa pada masa kolonial dan Amerika dengan negara maju saat ini. Kekayaan alam mengalir ke negara-negara tersebut dengan mengeksploitasi kebanyakan di negara-negara koloni sebelumnya (pascakolonial). Itulah pola yang termasuk dalam ekstraktivisme ini, dengan praktik diekstraksi dan diekspor, yaitu kekayaan alam di suatu wilayah atau negara diambil lalu dibawa keluar.

Di dalam Karya Anna J. Willow diatas, dikatakan juga bahwa ekstraktivisme telah terjadi melalui industri penebangan kayu (*logging*) di dalam hutan (*forest*), bendungan untuk generator listrik tenaga air (*dam*), pertambangan mineral (*mining*), pertambangan batubara, (*coal mining*) dan industri minyak dan gas (*oil and gas*) (Willow, 2019, 17-21). Menurut Willow, kegiatan ekstraktif ini dimulai ketika orang-orang Eropa datang ke Amerika Utara dan Kanada sampai belahan dunia lain seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin hingga sekarang. Di samping itu, dari keenam membentuk ekstraktivisme di atas, khususnya di Asia Tenggara atau Dunia Melayu, sekarang telah terjadi aktivitas ekstraktivisme lainnya yaitu perkebunan monokultur, seperti perkebunan kelapa sawit (Goh and Potter, 2023). Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 perkebunan karet, kopi, tebu, dan teh banyak dibudidayakan oleh kolonialisme Inggris dan Belanda di Hindia Belanda dan British Malaya (Alatas, 1977; Dick, 2002; van Zenden & Marks, 2012). Akan tetapi, sekarang perkebunan menjadi industri ekstraktif paling masif yang ada di kedua negara pascakolonial tersebut, yaitu Malaysia dan Indonesia.

Willow (2019, 17-22) menegaskan karakteristik itu dan tujuan utama dari ekstraktivisme adalah orientasinya mendapatkan keuntungan ekonomi. Dengan orientasi utama tersebut, penghapusan populasi lokal dan kerusakan alam sekitar dalam bentuk polusi air, bencana banjir dan tanah longsor juga polusi udara dan kerugian sosial budaya lain tidak dipedulikan. Ketamakan industri ekstraktif ini mengabaikan masalah ekologi/alam sekitar (*ecological damage*) dan masalah sosial budaya yang dihasilkan oleh pengerukan sumber daya alam dan kerusakan kekayaan sosial budaya masyarakat lokal.

#### 3.4.1. Ekstraktivisme Budaya

Ramón Grosfoguel (2020, hal.203-218) dalam *Epistemic extractivism : A Dialogue with Alberto Acosta, Leanne Betasamosake Simpson, and Silvia Rivera Cusicanqui* menjelaskan tentang ekstraktivisme pengetahuan di masyarakat lokal di mana eksploitasi sumber alam berlaku. Karya ini adalah salah satu dari tulisan di dalam buku berjudul *Knowledge Born in the Struggle: Constructing the Epistemologies of the Global South* diedit oleh Boaventura de Sousa Santos dan Maria Paula Meneses. Pada dasarnya, ekstraktivisme pengetahuan atau ekstraktivisme budaya di dalam prakteknya adalah cara yang dilakukan untuk memanfaatkan pengetahuan lokal untuk melancarkan eksploitasi sumber daya alam di tempat itu. Caranya adalah dengan mencocokkan pengetahuan lokal tersebut dengan kepentingan industri ekstraktif yang ada. Artinya, pengetahuan lokal dan budaya masyarakat setempat dibuat seolah - oleh sejalan dan mendukung proses ekstraktivisme yang ada.

Di dalam ketentuan akademik, metode ini dikenal dengan adaptasi pengetahuan lokal untuk kepentingan pembangunan. Pengetahuan dan budaya lokal dipelajari bukan untuk dipertahankan, akan tetapi untuk memanfaatkan supaya mendukung kepentingan pembangunan (*developmentalism*) di wilayah tempat eksploitasi sumber daya alam berlaku (Grosfoguel, 2020). Praktik ini misalnya dilakukan dengan melakukan ritual adat atau upacara adat tertentu dalam menyambut pembukaan operasi suatu perusahaan pada suatu daerah yang kaya sumber daya alam, walaupun sebelumnya dan di hari kemudian, perusahaan tersebut adalah perebut tanah ulayat dari masyarakat lokal tersebut. Namun, karena upacara adat dan ritual tertentu sudah dilakukan, maka sudah dianggap wajar untuk melakukan eksploitasi alam di daerah tersebut.

Ekstraktivisme pengetahuan ini juga diketahui dengan nama ekstraktivisme yang bersifat kognitif dimana prakteknya berupa penaklukan pikiran sampai penaklukan budaya (aneksasi budaya). Grosfoguel (2020, 207) membagi ekstraktivisme pengetahuan atau ekstraktivisme kognitif ini dalam dua kategori, yaitu ekstraktivisme epistemologis (*epistemological extractivism*) dan ekstraktivisme ontologis (*ontological extractivism*). Keduanya adalah dua bentuk penaklukan yang masing-masing memiliki jalannya sendiri. Namun, agenda untuk *developmentalism* dari praktik ekstraktivisme ini bisa diterima secara halus (*hegemonik*) tanpa perlawanan dari masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem ekstraktif ini. Asimilasi pengetahuan lokal dengan budaya modern di dalam ekstraktivisme epistemologi adalah kuncinya (Grosfoguel, 2020, 207-208). Bagaimana pengetahuan lokal bisa berkoordinasi dan mendukung kepentingan pembangunan adalah tujuan dari ekstraktivisme epistemologi ini. Secara epistemik, proses seleksi pengetahuan dan praktik budaya akan terjadi yaitu budaya dan pengetahuan yang mendukung akan ditampung, sementara yang menentang akan dihapus.

Sementara itu, secara ontologis, perilaku egosentris atau egois adalah ditanamkan pada kesadaran dan pada cara berpikir ke masyarakat lokal. Dengan kesadaran dan sarana pemikiran individualistis dan berorientasi keuntungan pribadi itu, lalu kesadaran dan budaya kolektif masyarakat bergeser ke kesadaran dan budaya individualis. Akibatnya, masyarakat akan dengan mudah berorientasi laba sampai dengan kepentingan diri, sehingga perusahaan ekstraktif bisa masuk dan diterima oleh masyarakat lokal dimana industrinya ekstraktif itu bekerja mengeksploitasi sumber daya alam (Grosfoguel, 2020, 207-208; 212-213). Dampak yang timbul dari pengaruh kesadaran dan pengetahuan individualis yang dikatakan di atas adalah diabaikannya kepentingan kolektif dengan alam dan kepentingan keamanan alam sekitar dari bencana alam dalam bentuk banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bencana lainnya. Terlebih lagi, kelestarian alam dari konsekuensi kerusakan akibat ekstraktivisme yang dikatakan tadi, tidak lagi menjadi perhatian dan konsensus utama. Sebaliknya, keuntungan dikedepankan.

### **3.5 Migrasi (Migration)**

Salah satu hal yang terjadi pada zaman kolonial akibat dari kolonialisme suatu wilayah adalah pemindahan manusia. Migrasi adalah istilah yang sering digunakan untuk aktivitas perantauan untuk masyarakat di wilayah Nusantara. Mobilitas manusia juga adalah istilah yang sering digunakan. Perantauan adalah contoh yang disampaikan oleh Syed Farid Alatas di dalam

pekerjaannya Masalah Eurosentrisme di dalam Kajian Alam Melayu: Arah Kepada Pengetahuan Mandiri untuk mengkritik Eurosentrisme di dalam penggunaan istilah “migrasi” penduduk di daerah Nusantara. Negara-negara di Nusantara tetap memiliki basis budaya yang sama atau terkait (Alatas, 2021, 5). Sehingga, dia menekankan penggunaan istilah “merantau” bagi mereka yang melakukannya perpindahan di wilayah Nusantara, seperti masyarakat Sumatera Barat yang bermigrasi ke Negeri Sembilan, di Malaysia. Adapun “migrasi” terjadi jika seseorang dari daerah A dengan latar belakang tempat berbeda berpindah ke tempat lain, misalnya masyarakat Melayu ke negara-negara Arab.

Di dalam kajian ini konsep merantau dan migrasi yang mana kolonialisme, ekstraktivisme, dan kapitalisme dinilai menyebabkan pemindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Bentuknya beragam, yaitu disebabkan oleh keinginan itu sendiri, atau dimobilisasi oleh pemerintah kolonial itu sendiri (Mains et al., 2013; Leeuwen & Foldvary, 2016; Salazar, 2016; Alatas, 2021). Bentuk pemindahan populasi berbeda latar belakang wilayah dan budaya inilah penyebabnya mobilitas manusia menjadi dinamis. Hal itulah adanya bahan menarik di dalam kajian migrasi dan perantauan di kepulauan ini, khususnya di Pulau Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam sejak dari zaman kolonial sampai sekarang.

Di Asia Tenggara, perdagangan, pembukaan tanah perkebunan dan pertambangan membuat pekerja dari daerah lain datang atau dibawa ke daerah pertambangan dan perkebunan kolonial oleh pemerintah kolonial (van Leeuwen & Foldvary, 2016; Salazar, 2016). Di samping itu, ada faktor kekuatan menarik di daerah koloni untuk datang melakukan bisnis atau menjadi karyawan perkebunan dan pertambangan. Olehnya itu, di masa kolonial, kepentingan kolonial adalah faktor penyebab utama keberagaman identitas populasi suatu wilayah yang dijajah oleh kolonialisme Eropa.

Hamka (1939) dan Mochtar Lubis (1982) menceritakan perantau dan kuli kontrak perkebunan ini di dalam karya literatur mereka. Hamka menceritakan pekerja kuli orang Jawa dan orang Minang di Deli, Sumatera Timur dalam novelnya Merantau ke Deli. Sementara itu, Mochtar Lubis menceritakan situasi kehidupan kuli kontrak perkebunan di Kerinci, Jambi, pada masa kolonial di dalam cerita pendeknya Kuli Kontrak. Kehidupan kuli di daerah Kerinci ini menjelaskan mayoritas dari mereka berasal dari Jawa di dalam penelitian Lestari dan Yasing (2021) berjudul Kehidupan Buruh Perkebunan Teh Kayu Aro Tahun 1925-1943. Sementara itu, Friska Muflihun Soleh (2019) dalam Migrasi Etnis Jawa di Kayu Aro 1920-1998 juga menjelaskan peristiwa serupa di kabupaten tersebut Kayu Aro, Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Dengan periode waktu lebih lama, yaitu dari zaman kolonial sampai masa Soeharto, karya sastra dan sejarah di atas menunjukkan bahwa proses mobilitas penduduk di Nusantara terjadi secara sukarela dan atas campur tangan pemerintah (transmigrasi), baik oleh pemerintah kolonial Belanda maupun pemerintah nasional Indonesia.

Adanya populasi baru dari daerah lain ini menyebabkan perbedaan budaya pada tempat-tempat yang dieksploitasi, khususnya perbedaan dalam menghargai alam dan lingkungan lokal. Amalan menjaga alam dan tindakan ekstraktif tidak sesuai dengan kehidupan subsisten banyak masyarakat adat di Nusantara yang daerahnya dinilai kaya Sumber Daya Alam (Mains et al., 2013). Hal ini adalah faktor penting di dalam menentukan kontinuitas ekologi suatu wilayah yang dihuni oleh orang yang berbeda-beda budaya seperti orang Eropa datang dengan budaya ekstraktifnya yang eksploitatif yang destruktif dan mengganggu keseimbangan ekologi tanah koloni.

#### 4. Penutup

Kajian literatur ini memperkaya literatur dari Huggan and Tiffin (2015) yang hanya memberikan variabel development, entitlement, dan christianity dalam karyanya *Postcolonial Ecocriticism*. Sumbangan kajian literatur ini dengan mengambil khazanah kajian pascakolonial dan ekologi pascakolonial di Kepulauan Nusantara (*Malay Archipelago*), *Malay World* (Dunia Melayu) atau pada pasca perang dunia kedua dikenal dengan kawasan Asia Tenggara ini, yaitu adanya tambahan



variabel berupa *extractivism* dan *migration*. Kedua tambahan variabel ini didapatkan dari kajian terhadap wacana dan praktik ekologi pascakolonial di Asia Tenggara. Sebagai sumbangan saran untuk kajian literatur ke depan, peneliti selanjutnya dapat mengkaji aspek gender dan respon terhadap perubahan ekologi yang terjadi akibat kolonialisme dan developmentalisme di negara-negara bekas jajahan, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika itu sendiri.

#### **Daftar Pustaka**

Alatas, Syed Hussain. (1977). *The Myth of Lazy Native*. Routledge.

Alatas, Syed Hussain. (2021). *Masalah Eurosentrisme dalam Pengkajian Alam Melayu: Ke Arah Ilmu Mandiri*. The Malay Heritage Foundation. [https://mhf.org.sg/wp-content/uploads/2021/08/CLS\\_02-Masalah-Eurosentrisme-dalam-Pengkajian-Alam-Melayu-Ke-Arah-Ilmu-Mandiri-ISSN-compressed.pdf](https://mhf.org.sg/wp-content/uploads/2021/08/CLS_02-Masalah-Eurosentrisme-dalam-Pengkajian-Alam-Melayu-Ke-Arah-Ilmu-Mandiri-ISSN-compressed.pdf)

Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; and Tiffin, Helen. (1989). *The Empire Writes Back*. Routledge.

Barker, Chris. (2004). *The Sage Dictionary of Cultural Studies*. Sage

Barker, Chris & Jane. (2016). *Cultural Studies: Theory and Practice* 5th edition. Sage

Banerjee, Mita. (2016). "Ecocriticism and Postcolonial Studies" in Hubert Zapf (Ed.).

*Handbook of Ecocriticism and Cultural Ecology*. De Gruyter.

Beilin, Kata and López, Daniel Ares. (2019). "Environmental Cultural Studies as a Transdisciplinary Field: Latin American and Iberian Studies" in *Environmental Cultural Studies Through Time: The Luso-Hispanic World* Ed. Kata Beilin, Kathleen Connolly, Micah McKay. <https://cla.umn.edu/hispanic-issues/online/environmental-cultural-studies-through-time-luso-hispanic-world>

Chua Beng Huat. (2008). *Southeast Asia in Postcolonial Studies: an introduction*. *Postcolonial Studies*, 11(3), 231-240, DOI: 10.1080/13688790802226637

Collin, P.H. (2004). *Dictionary of Environment and Ecology*. Bloomsbury.

DeLoughrey, Elizabeth & Handley, George B. (2011). *Postcolonial Ecologies: Literature of Environment*. Oxford University Press.

Dick, Howard, Houben, Vincent J.H., Lindblad, J. Thomas, Wie, Thee Kian. (2002). *The Emergence of a National Economy An economic history of Indonesia, 1800–2000*. Allen & Unwin.

Durham, Meenakshi Gigi and Kellner, Douglas M. (2006). *Media and Cultural Studies: KeyWorks, Revised Edition*. Routledge.

Francis, Andrew. (2015). *Culture and Commerce in Conrad's Asian Fiction*. Cambridge University Press.

Gandhi, Leela. (2019). *Postcolonial Theory: A Critical Introduction, Second Edition*. Columbia University Press.

Gilbert (2000). *Postcolonial Theory: Contexts, Practices, Politics*. Verso.

Gilbert, Bart Moore; Stanton, Gareth, & Maley, Willy. (2013). *Postcolonial Criticism*. Routledge.

Grosfoguel, Ramón . (2020). "Epistemic extractivism: A Dialogue with Alberto Acosta, Leanne Betasamosake Simpson, and Silvia Rivera Cusicanqui" in *Knowledge Born in the Struggle: Constructing the Epistemologies of the Global South* yang diedit oleh Boaventura de Sousa Santos dan Maria Paula Meneses. Routledge.

Hamka. (1939). *Merantau ke Deli*. Pedoman Masyarakat.

Huggan, Graham dan Tiffin, Helen. (2015). *Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment*. Routledge.

Koon, Wong Soak. (1990). "Conrad dan Retorika para Imperial British dalam buku *Kolonialisme di Malaysia dan negara-negara lain*". In Cheah Boon Keng dan Abu Talib Ahmad (Eds.). *Kolonialisme di Malaysia dan negara-negara lain* (pp.341-362). Fajar Bakti.

Lubis, Mochtar. (1982). *Kuli Kontrak*. Sinar Harapan Lestari dan Yasing. (2021). *Kehidupan Buruh Perkebunan Teh Kayu Aro Tahun 1925-1943*. *Jurnal Siginjai*. 1(1). 27-38. <https://doi.org/10.22437/js.v1i1.11881>.

Mains, Susan P., Mary Gilmartin, Declan Cullen, Robina Mohammad, Divya P. ToliaKelly, Parvati Raghuram & Jamie Winders. (2013). *Postcolonial migrations*. *Social & Cultural Geography*. 14 (2). 131-144. <https://doi.org/10.1080/14649365.2012.753468>.

Mukherjee, Upamanyu Pablo. (2010). *Postcolonial Environments: Nature, Culture and the Contemporary Indian Novel in English*. Palgrave Macmillan.

Nayar, Pramod K. (2015). *The Postcolonial Studies Dictionary*. Wiley Blackwell.

Nixon, Rob (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press.

Pauly, Daniel. (2004). *Darwin's Fishes: An Encyclopedia of Ichthyology, Ecology, and Evolution*. Cambridge University Press.

Salazar, N. B. (2016). *The (Im)Mobility of Merantau as a Sociocultural Practice in Indonesia*.

In N. G. Bon & J. Repič (Eds.), *Moving Places: Relations, Return and Belonging* (1st ed., Vol. 29, pp. 21-42). Berghahn Books. <https://doi.org/10.2307/j.ctvr694z4.4>.

Soleh, Friska Muflihun. (2019). *Migrasi Etnis Jawa di Kayu Aro 1920-1998*. Thesis. State University of Padang.

Turner, Graeme. (2003). *British Cultural Studies: An Introduction*, Third Edition. Routledge.

Udasmoro, Wening (Ed.). 2020. *Gerak Kuasa: Politik Wacana, Identitas, Ruang/Waktu dalam Bingkai Kajian Budaya dan Media*, editor Wening Udasmoro. KPG Gramedia.

van Leeuwen, Bas; Peter Földvári. (2016). *Economic Mobility in a Colonial and Postcolonial Economy: Indonesia*. *The Journal of Interdisciplinary History*. 47 (2): 171-191. doi: [https://doi.org/10.1162/JINH\\_a\\_00976](https://doi.org/10.1162/JINH_a_00976).

van Zanden, Jan Luiten & Marks, Daan. (2012). *An Economic History of Indonesia 1800-2010*. Routledge.

Warren, J.F. (2008). Joseph Conrad's Fiction as Southeast Asian History: Trade and politics in east Borneo in the Late 19th century. In James Warren (Ed.), *Pirates, Prostitutes and Pullers: Explorations in the Ethno- and Social History of Southeast Asia* (pp.33-46). University of Western Australia Press.

Warren, J.F. (1977). Joseph Conrad's Fiction as Southeast Asian History: Trade and politics in east Borneo in the Late 19th century. In *The Brunei Museum Journal*, 4 (1). pp. 21-34. <http://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/18176>

Williams, Raymond (1960). *The Idea of Nature*. Verso.

Willow, Anna J. (2019). *Understanding ExtrACTIVISM: Culture and Power in Natural Resource Disputes*. Routledge.

